

## **BAB IV**

### **DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai secara geografis terletak pada koordinat  $2^{\circ} 1' 37''$ b -  $2^{\circ} 35' 58''$  Lintang Selatan dan  $144^{\circ} 50' 58''$  -  $115^{\circ} 50' 24''$  Bujur Timur. Dengan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar  $892,7 \text{ km}^2$  atau hanya sekitar 2,38 % dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki sejumlah wilayah administrasi desa/ kelurahan sebanyak 219 desa/kelurahan dengan Jumlah penduduk sebanyak 226.727 Jiwa. Adapun Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong;
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin , Barito Kuala dan Hulu Sungai Tengah;
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebelum 25 Februari 2003,

HSU merupakan pusat pertumbuhan Banua Lima (terdiri atas Kabupaten Tabalong, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Utara dan Selatan)

masih terbagi dalam dua wilayah topografi yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran Rendah dengan ketinggian berkisaran 0-25 meter dari permukaan laut yang didominasi oleh lahan rawa baik yang tergenang monoton maupun secara periodic. Sedangkan dataran Tinggi yakni antara 0-2% dengan rata-rata ketinggian antara 0 hingga 7 Meter dari permukaan laut.<sup>9</sup>

## **B. Visi Misi Partai Golkar**

Visi Partai GOLKAR adalah Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia. Selanjutnya Misi Partai Golkar yaitu :

- a) Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
- c) Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan

---

<sup>9</sup> <https://www.hsu.go.id/web/letak-geografis/>

yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.<sup>10</sup>

### C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara .

Tabel 4.1. Struktur Organisasi Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara.

NO	NAMA	JABATAN
1.	DRS.H. ABDUL WAHID HK,MM,M.Si	Ketua DPD
2.	ALMIEN ASHAR SAFARI,SKM	Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan
3.	HERRY DESPANI,SP	SEKRETARIS
4.	H.MUKARRAM FIKRI,SE	Wakil Ketua Bidang Kerjasama Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
5.	H.PANDI	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
6.	H.NORANI,SH	Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM
7.	HJ.NURHANANIAH,S.Sos	Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
8.	H.FADILAH	Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
9.	AHMADAR RIFA'I,S.Pd.i	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga

<sup>10</sup> <https://www.partaigolkar.com/visi-dan-misi/>

10.	HJ.HUSNAH	Wakil Ketua Bidang Perempuan
11.	DARMA SETIAWAN	Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini
12.	AULIA NOOR ILMU,SH.i	Wakil Ketua Bidang Kerohanian
13.	H.PAULUS SESA,SP	Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan
14.	SHALEH MAULANA,S.Pd.i	Wakil Sekretaris Bidang OKK
15.	RINA	Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu
16.	H.MUKHLIS	Wakil Sekretaris Bidang Kerjasama Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
17.	RAMADHANI,SH	Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM
18.	MARTASIAH	Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
19.	H.M.YUNUS	Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
20.	HADI HIDAYAT,S.Pd.i	Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan

		Olahraga
21.	TINI RUSTINI,SE	Wakil Sekretaris Bidang Perempuan
22.	NOVENDRI PRAYOGI,SE	Wakil Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini
23.	ERNA PUSPITA S.Ag	Wakil Sekretaris Bidang Kerohanian
24.	HJ.ROSALINA	Wakil Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan
25.	AKHMAD SYARMADA	BENDAHARA
26.	HJ.MASNI	Wakil Bendahara 1
27.	NOOR KHALIDA PAJERIAH,SH	Wakil bendahara 2
28.	FARID WAJEDI,MA	Anggota Bagian Pemenangan Pemilu
29.	H.HAMDANI,S.Sos	Ketua Bagian Organisasi ,Kaderisasi dan Keanggotaan
30.	RABIATUL MAHMUDAH	Anggota Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

#### D. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 5 orang Yang memberikan Informasi di Partai Golkar dan 1 Orang Pengamat Politik. Maka akan diperoleh gambaran mengenai Peran Ketua DPD Partai Golkar dalam Menentukan Calon Kepala Daerah Pada Pilkada

Tahun 2017 di Hulu Sungai Utara. Dalam laporan Hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut.

Wawancara di Partai Golkar Kabupaten HSU.

1. Informan (1)

1) Identitas informan

- a. Nama : Herry Despani.SP
- b. Jabatan : Sekretaris Partai Golkar Kabupaten HSU
- c. Umur : 59 Tahun
- d. Lulusan : S1 Sarjana Pertanian
- e. Sudah berapa lama tergabung dalam pengurus partai Golkar : dari tahun 1987

2) Uraian

Menurut Bapak Herry selaku sekretaris Golkar, mengenai peran Ketua DPD Sendiri dalam menentukan Calon Kepala Daerah Disini partai Golkar sendiri memberikan wadah untuk kader Partai Golkar, partai lain, ataupun Masyarakat umum yang ingin mencalon sebagai Kepala Daerah. Karena semua orang berhak untuk mencalonkan dirinya dan terbuka untuk umum.

Ketua DPD mengadakan rapat untuk semua pengurus dan menyampaikan “siapa pun yang berminat untuk mencalonkan diri pendaftarannya terbuka untuk umum, dan selanjutnya siapa yang mendaftar tadi di serahkan ke DPD tingkat dua dan di seleksi oleh DPP tingkat satu”. Jangka waktu pendaftarannya 6 bulan dengan

adanya musyawarah. Bagi yang ingin mencalon tadi di usul kan ke DPD tingkat dua, selanjutnya di usulkan DPD tingkat dua ke DPP tingkat satu. Di tingkat satu itu baru di seleksi siapa yang ingin mencalon tersebut dengan adanya survey dari DPP tingkat satu, apabila surveynya tinggi maka orang tersebut yang bakal di calonkan menjadi bakal calon Kepala Daerah. Dengan 3 kali survey, surveynya dari tingkat pusat langsung yang terjun kelapangan untuk menilai bagaimana si bakal calon tadi.

Pada tahun 2017 sendiri yang menjadi Ketua DPD bukan Bapak Wahid namun Bapak Shabdillah, di Tahun 2017 kemaren Bapak Wahid dan Shabdillah mencalonkan diri juga sebagai bakal calon kepala daerah. Namun pada saat survey Pak Shabdillah penilaiannya rendah, lebih tinggi Bapak wahid dalam survey. Kemudian Bapak Wahid di ajukan sebagai bakal calon kepala daerah dari partai Golkar. Dan pada saat itu juga Pak Shabdillah mengundurkan diri sebagai ketua DPD Partai Golkar, ketika posisi ketua DPD Kosong dan Bapak Wahid di angkat menjadi ketua DPD Partai Golkar. Ketika ditanyakan mengenai kriteria bakal calon dan strategi seperti apa yang dilakukan beliau menjawab tidak ada kriteria, karena semua memiliki hak dalam mencalonkan dirinya apabila memang itu yang terbaik maka itu yang akan di calonkan. kalau mengenai strategi itu bagaimana ketika Partai

Golkar mengusung Calon dan pada hasil Pilkada itu Partai Golkar menang.<sup>11</sup>

## 2. Informan (2)

### 1) Identitas informan

- a. Nama : Rina
- b. Jabatan : Sekretaris Pemenangan Pemilu Partai Golkar
- c. Umur : 46 Tahun
- d. Lulusan: SLTA
- e. Sudah berapa lama tergabung dalam pengurus partai Golkar : 20 tahun

### 2) Uraian

Menurut ibu Rina, Peran Ketua DPD dalam menentukan calon Kepala Daerah ketika adanya pemilihan Kepala Daerah maka yang lebih diutamakan adalah ketua DPD sendiri dalam mencalon sebagai bakal calon Kepala Daerah dan anggota dewan yang ada di Partai Golkar. Karena sudah dijamin anggota dewan itu lebih berpengalaman dalam bersosialisasi dan bisa menarik simpatik masyarakat. Mengenai strateginya yakni bisa bersosialisasi kepada masyarakat untuk menarik simpatik masyarakat agar masyarakat mengenal bakal calon kepala daerah, karena kebanyakan orang pintar teorinya saja namun dalam prakteknya tidak bisa. Jadi strateginya disini mencari yang lebih

---

<sup>11</sup> Herry Despani, *Wawancara Pribadi*, Partai Golkar HSU, 21 September 2021, Pukul 10:00 Wita.



berpengalaman dalam lapangan dan berwibawalah, jadi ketua DPD sendiri yang dipilih, karena mencakup semua aspek.<sup>12</sup>

### 3. Informan (3)

#### 1) Identitas informan

- a. Nama : H. Pandi
- b. Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan salah satu Anggota dewan yang ada di Partai Golkar.
- c. Umur : 52 Tahun
- d. Lulusan : S1 Administrasi Publik
- e. Sudah berapa lama tergabung dalam pengurus partai Golkar: 9 Tahun

#### 2) Uraian

Menurut Pak Pandi ketika ditanyakan mengenai Peran Ketua DPD dalam menentukan calon Kepala Daerah Ketua DPD membuka seluas luasnya secara umum siapa yang ingin mencalonkan diri, karena selanjutnya bakal calon tadi diserahkan ketingkat DPP tingkat 2 dan selanjutnya diserahkan Kepada DPP tingkat 1. Di tingkat satu itulah yang bakalan di survey calon yang ingin mencalonkan dirinya untuk mendaftar sebagai bakal calon Kepala Daerah. Strategi yang digunakan yaitu mencari bakal calon yang bisa ‘ memiliki nilai jual dimasyarakat’ untuk bisa menarik simpatik masyarakat. Dengan kita bisa menarik simpatik

---

<sup>12</sup> Rina, *Wawancara Pribadi*, Partai Golkar HSU, 27 September 2021, Pukul 11:30 Wita.

masyarakat itu akan menjadi keuntungan besar dalam Suatu partai sehingga Partai Politik bisa memenangkan Pilkada. Partai Golkar sendiri mampu mencapai 13 kursi dalam Parlemen namun pada Tahun 2019 Partai Golkar turun satu Kursi sehingga menjadi 12 kursi saja dalam Parlemen.

Partai urutan tertinggi di Kabupaten HSU Yakni :

- a. Partai Golkar : 12 kursi
- b. Partai PKB : 5 Kursi
- c. Partai P3 : 4 Kursi
- d. Partai PKS : 3 Kursi
- e. Partai Nasdem : 2 kursi
- f. Partai PBB : 1 Kursi
- g. Partai PDIP : 1 Kursi<sup>13</sup>

#### 4. Informan (4)

##### 1) Identitas informan

- a. Nama : H. Fadillah
- b. Jabatan : Bendahara partai Golkar(2017) sekarang menjabat Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup dan Anggota DPR yang ada di Partai Golkar ( anggota DPR sebagai Ketua komisi 2)
- c. Umur : 46 Tahun
- d. Lulusan : S1 Sarjana Ekonomi

---

<sup>13</sup> Pandi, *Wawancara Pribadi*, Partai Golkar HSU, 27 September 2021, Pukul 13:30 Wita.

- e. Sudah berapa lama tergabung dalam pengurus partai Golkar: dari 2008 sampai sekarang.

## 2) Uraian

Menurut Bapak Fadillah, Peran Ketua DPD sangat penting, ketua DPD membuka untuk umum siapa saja di kadernya yang ingin mencalonkan diri, lalu di usulkan ketua DPD tadi untuk nama-nama yang mencalonkan diri ke DPD Provinsi atau DPD tingkat 2 , lalu di serahkan DPD 2 ke DPP tingkat satu. Nah di sanalah nama-nama yang mencalonkan diri tadi di seleksi dengan mensurvey kelayakan calon yang mencalonkan diri tadi. Apabila salah satu nama hasil surveinya tinggi.maka yang hasil survey yang tinggi tadilah yang akan di usung untuk bertarung dalam pilkada. Mengenai strategi untuk mencalonkan Kepala Daerah mencari orang yang lebih lama berkecimbung dalam partai golkar dan banyak diminati masyarakat, lebih kepada bisa menarik simpatik masyarakat. Namun kendala yang terjadi karena pencalonan ini terbuka untuk umum, jadi kader partai tadi boleh mencalonka dirinya untuk ikut mencalon sebagai bakal calon Kepala Daerah. Namun semuanya di putuskan oleh DPP Tingkat 1 untuk kelayakan bakal calon tadi. Yang di takutkan tadi apabila dalam satu partai terdapat 2 calon yang ingin mencalon. Dan kendalanya apabila kalah dalam pertarungan Pilkada.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Fadillah, Wawancara *Pribadi*, DPRD HSU, 30 September 2021, Pukul 10:15 Wita.

## 5. Informan (5)

### 1) Identitas informan

- a. Nama : H. Mukarram Fikri
- b. Jabatan : Wakil Ketua Bidang Kerjasama Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dan salah satu Anggota DPR yang ada di Partai Golkar, Jabatan Di DPR ( Wakil ketua Komisi 3)
- c. Umur : 57 tahun
- d. Lulusan : S1 Sarjana ekonomi
- e. Sudah berapa lama tergabung dalam pengurus partai Golkar: dari 2014 sampai sekarang.

### 2) Uraian

Menurut Bapak Mukarram, Peran dari Ketua DPD Partai Golkar Peran nya itu sangat penting, Partai Golkar yang ada di kabupaten ini hanya menjadi sarana pengusulan kepada DPD tingkat 2 dan di serahkan ke DPP tingkat 1. Untuk di seleksi kandidat yang akan mencalon apabila survey kandidat tadi tinggi, maka itu yang akan di usung untuk calon kepala daerah. Mengenai srategi dari Ketua DPD melihat kriteria-kriteria yang pantas untuk di calonkan, memiliki kapasitas yang baik dan berbobot bisa menarik simpati masyarakat dan kendala yang di hadapi Banyak

yang berminat untuk mendaftarkan dirinya untuk mencalonkan diri namun semua keputusan itu dari tingkat 1 DPP.<sup>15</sup>

## Wawancara Dengan Pengamat Politik di Kabupaten Hulu Sungai Utara

### 1. Informan .

#### 1) Identitas informan

- a. Nama : Budi Lesmana
- b. Umur : 43 Tahun
- c. Jabatan : Pengamat Politik
- d. Alamat : Sungai Malang
- e. No hp : 0821-5776-6776

#### 2) Uraian

Partai Politik menurut pandangan Bapak Budi, ketika berbicara mengenai Parpol adalah bagian dari uranamen politik yang memang tidak bisa diabaikan. Karenanya peran partai politik itu penting apalagi dalam undang-undang Partai Politik itu sendiri mengamanatkan bagaimana partai politik itu harus memerankan diri menjadi penyalur aspirasi dan wadah pendidikan politik. Otomatis bahwa tidak bisa diungkiri keberadaan partai politik itu memiliki nilai strategis. Sehingga bagaimana partai politik mampu memerankan dirinya menjadi bagian strategis dalam konteks

---

<sup>15</sup> Mukarram Fikri , *Wawancara Pribadi*, DPRD HSU, 30 September 2021, Pukul 11:00 Wita.

kehidupan demokrasi.<sup>16</sup>

Selanjutnya pandangan Bapak Budi mengenai Pemilu saat ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari beberapa pelaksanaan pemilihan baik itu pemilihan Presiden, Gubernur, dan Bupati. Dinamika nya bagus aja karena memang ada perhatian atau atensi masyarakat terhadap kegiatan kepemiluan dalam konteks pemilihan. Apalagi pemilihan dalam konteks kedekatan emosiaonal seperti pemilihan Bupati mengenai ukurannya bagaimana respon publik untuk penyelenggaraan tingkat partisipasinya cukup tinggi. namun harapannya yang lebih di utamakan itu bagaimana bahwa keterlibatan publik itu memang dengan kesadaran bukan karena mobilitas sehingga partisipasi itu lebih di latar belakang oleh melek politik. Meskipun presentasinya tidak setinggi yang di harapkan oleh penyelenggara tetapi bobot kualitasnya itu lebih baik.

Misalkan seperti kecendrungan *many politik* tidak muncul dan orang memilih karena kesadaran akan politik. Akan tetapi selama ini kan yang berkembang bahwa paradigma pemilihan khususnya terkait dengan Pilkada itu selalu di pengaruhi oleh uang. Orang datang ke TPS kerena uang nah ini yang mestinya harus di hilangkan sehingga efek dari makin derasnya many politik itu membuat biayaaya politik itu tinggi sehingga

---

<sup>16</sup> Budi, *Wawancara Pribadi*, Pengamat Politik di HSU, 13 Desember 2021, Pukul 10.00 Wita.

kecendrungan yang terpilih juga akhirnya menjadi tidak amanah. Jadi inilah sesungguhnya tantangan berat jika kita lihat bagaimana dalam penyelenggaran pemilihan dari waktu ke waktu hanya berpatokan pada masyarakat memilih datang ketempat pemilihan. Misalkan 100% yang datang untuk memilih partisipasinya tinggi , namun menurut saya partisipasi itu bukan hanya mereka datang ke TPS tapi bobot kualitas nya mencoblos itu di pengaruhi oleh apa. Karena pengaruh kesadarannya kah atau hanya karena pengaruh uang atau mobilitas saja.

Pandangan bapak Budi mengenai Kepala Daerah, nah ini sangat menarik dengan kondisi kita saat ini paska kejadian kepala daerah kita yang di tangkap KPK. Keberadaan Kepala Daerah sebetulnya sangat strategis karena menangani menengai otonomi daerah dan menangani bagaimana penyelenggaraan pemerintahan. Maka kontek keberadaan kepala daerah adalah aktor utama walaupun tidak semua pekerjaan di handle namun mekanisme tata kelola dan manajemen itu mereka yang mengkondisikan. Bagaimana ia mengarahkan agar tercapai atas apa visi-misi nya yang di sampaikan jadi manajemen inilah yang di butuhkan kepala daerah itu orang yang benar-benar memiliki kualitas dan integritas bukan orang yang hanya memiliki uang dan ia bisa membeli orang-orang untuk memilihnya.

Seseorang yang akan menjadi pemimpin di tingkat daerah itu

harus benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin dan ia harus memiliki kreativitas , inovasi, dan terobosan-terobosan pemikiran penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun apabila kita memiliki Pemimpin yang Bagus maka pemerintahannya juga akan bagus dan sebaliknya kalau kita memiliki pemimpin yang tidak bagus maka pemerintahannya pun akan berantakan. Sehingga keberadaan kepada daerah merupakan tanggung jawab Parpol untuk menciptakan pemimpin yang baik dan amanah.

Pandangan bapak budi mengenai peran dan strategi Ketua DPD Partai Politik, karena keberadaan Kepala Daerah merupakan tanggung jawab Parpol untuk menyiapkan Seorang pemimpin yang baik. Sehingga peran yang harusnya di miliki oleh seorang Ketua DPD Partai politik ia harus melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap seorang yang nantinya akan menjadi pemimpin dan nilai rating di masyarakat itu tinggi . jadi Ketua DPD Parpol itu harus menyiapkan seorang pemimpin jauh-jauh hari yang sudah melalui tahapan-tahapan seleksi agar mendorong munculnya seorang pemimpin yang memiliki kualitas dan tanggung jawab. Selanjutnya menurut bapak ada 2 Strategi yang Harus di lakukan Ketua DPD Partai politik itu.

Pertama ia harus menyiapkan kader atau orang yang dari awal sudah di siapkan oleh partai politik yang sudah memenuhi



kriteria-kriteria seorang pemimpin. sehingga apabila ia akan bertarung di Pilkada ia bisa memenangkan pertarungan itu .

Kedua ia harus menyaring orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Pemimpin di lihat dari bagaimana respon masyarakat terhadap orang tersebut apakah sudah memenuhi kriteria dari masyarakat dan apakah ia layak untuk di usung secara kemampuan yang dimilikinya.

Alangkah lebih baik lagi apabila Ketua DPD partai itu sudah jauh-jauh hari menyiapkan kader atau orang yang akan di usungnya untuk bertarung dalam Pilkada . jangan mencari seseorang yang akan di usung ketika pendaftaran pilkada akan segera di laksanakan sehingga itu akan mempengaruhi bobot kualitas seseorang yang akan di usungnya. Dalam mencari kandidat yang akan di usung itu harus melalui tahapan-tahapan panjang sehingga terciptanya pemimpin yang berkualitas di masyarakat.

Meskipun setiap partai politik semuanya menjalankan pemerintahannya itu sesuai dengan prosedur yang telah di atur oleh AD ART nya , namun peran Ketua DPD Partai itu sangat penting dalam mencari atau menyiapkan kandidat yang nantinya akan di usung oleh partainya dengan melihat aspirasi masyarakat untuk mencari siapa-siapa orang yang berkompentensi dalam memimpin.

Pandangan Bapak Budi mengenai ‘‘Mahar Politik’’ dalam suatu partai politik, Nah ini menjadi delima kita semua. Sebetulnya tidak bisa di napikan dengan keberadaan mahar politik di suatu partai politik karena untuk mencalon itu harus memiliki biayaya. Sederhanya saja ketika kita memiliki traspotasi pasti kita membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan transpotasinya. Begitu juga dengan mahar politik kita harus memiliki biayaya utuk mencapai suatu tujuan kita. Namun yang harus di ingat mahar politik ini dalam konteks apa ? kalau dengan apa yang bapak cermati di beberapa praktek mahar politik itu untuk biayaya operasional mereka untuk kemenangan tetapi juga ada mahar itu hanya sekedar membeli kedudukan agar ia bisa di usung oleh Partainya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah ini yang menjadi permasalahannya apabila konteks ‘‘Mahar politik’’ itu di latar belakang untuk membeli kedudukan apalagi maharnya sampai jur-jur an jumlah nominal yang harus di keluarkan oleh si bakal calon tadi. Apabila nominal maharnya masuk akal dengan biayaya operasional yang di perlukan itu boleh-boleh saja namun apabila yang di keluarkan sudah tidak masuk akal nominalnya itu yang menjadi pertanyaan. Apakah partai politik itu hanya mementingkan materilnya saja atau mementingkan kualitas dari bakal calon yang harus di miliki.

Karena banyak sekali orang yang hanya memiliki uang

sehingga ia bisa membeli kedudukan namun dalam kualitas yang di milikinya tidak ada .<sup>17</sup>

### Matriks

#### Peran Ketua DPD Partai Golkar Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Tahun 2017 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 4.2. Wawancara dengan Kader Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara.

No	Nama Informan	Peran Ketua DPD Partai Golkar	Strategi Ketua DPD Partai Golkar	Hasil
1.	Herry Despani.SP	Membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin mendaftarkan diri untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah.	Mengadakan agenda rapat dalam penyampaian bagi kader-kader yang ingin mencalonkan dirinya yang nantinya nama-nama tadi akan di serahkan kepada DPP tingkat 1	Ketua DPD Partai Golkar dalam menentukan calon kepala daerah, karena Partai Golkar di tingkat Kabupaten/Kota hanya membuka seluas-luas nya bagi siapa saja yang ingin mencalonkan dirinya. Selanjutnya

<sup>17</sup> *ibid*

				nama-nama tadi diserahkan kepada DPD tingkat 2 di Provinsi dan selanjutnya akan di survey oleh DPP tingkat 1 . apabila salah satu nama yang mencalonkan diri tadi survey nya tinggi maka ia yang akan di usulkan menjadi calon Kepala Daerah.
2.	Rina	Mengutamakan seseorang yang sudah di kenal oleh masyarakat	Mencari orang yang lebih berpengalaman dalam menarik simpatik masyarakat dan lebih mengutamakan anggota dewan	Dari penjelasan ibu rina, mengenai peran ketua DPD Partai Golkar ia mengatakan bahwa ketika ada pencalonan Kepala Daerah yang lebih di utamakan itu Ketua DPD dan Anggota Dewan yang ada di

				Partai Golkar. selanjutnya mengenai strateginya adalah kemampuan si bakala calon tadi untuk bisa menarik simpati masyarakat agar kemudian ia bisa menang dalam pemilihan kepala daerah.
3.	H. Pandi	Membuka seluas-luasnya secara umum kepada siapapun yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi bakal calon	Mencari orang yang memiliki nilai jual di masyarakat	Peran ketua DPD membuka seluas-luasnya secara umum untuk siapa yang ingin mencalonkan dirinya. strategi mencari orang yang ‘memiliki nilai jual di masyarakat’.
4.	H.Fadillah	Membuka pendaftaran secara umum untuk	Mencari orang yang lebih lama berkecimbung di	Ketua DPD disini berperan dalam membuka

		siapa saja yang ingin mencalon	internal Partai	seluas-luasnya pendaftaran bagi siapa pun yang ingin mencalonkan dirinya . strateginya mencari orang yang lebih lama berkecimbung di internal partai politik
5.	H.Mukarram Fikri	Memberikan hak kepada siapa saja yang ingin mendaftarkan dirinya untuk mencalon karena partai golkar memberikan sarana untuk pengusulan	Mencari orang yang memiliki kriteria-kriteria yang pantas untuk di calonkan , dan memiliki bobot yang baik	Ketua DPD disini berperan dalam memberikan hak kepada siapapun yang ingin mencalonkan diri. Dalam sistem nya, Partai Golkar di Kabupaten/Kota hanya mejadi sarana pengusulan dan sekali lagi yang menyeleksi nama-nama yang mendaftarkan

				diri terletak pada DPP tingkat 1
--	--	--	--	-------------------------------------

### **E. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan diperoleh data dari hasil wawancara terhadap informan dalam penelitian ini, maka penulis akan menganalisis hasil dari penelitian yang berkenaan dengan Peran Ketua DPD Partai Golkar dalam menentukan calon kepala daerah Pada Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik tidak ada satupun negara yang tidak menggunakan Partai Politik yang didukung dengan sistem politik suatu Negara. Salah satu Partai Politik yang ada di Negara Indonesia adalah Partai Golongan Karya Atau biasa di sebut dengan Partai Golkar.

Partai Golkar ini Terbagi menjadi DPP Partai Golkar , Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Daerah Kabupaten/kota. Dalam suatu Organisasi besar tak pernah lepas dari Peran Ketua, yang mana Peran Ketua disini sangat penting dalam menentukan kebijakan untuk memutuskan suatu putusan dalam merekrut kader-kadernya yang di anggap berpotensi dalam menjalankan tatanan Pemerintahan.

Menurut penulis dari data yang sudah penulis dapatkan dari ke lima Informan dari Partai Golkar mengenai Peran Ketua DPD Partai Golkar dalam menentukan Calon Kepala daerah sesuai dengan AD ART yang berlaku dalam tugas , wewenang , dan tanggungjawab Dewan

Pimpinan Daerah Kabupaten/kota dibagian F yaitu Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung. Untuk mengatur Ketua DPD Partai Golkar dari 5 informan yang sudah peneliti wawancarai menjelaskan bahwa Ketua DPD sudah berperan dalam mengatur untuk membuka seluas-luasnya pendaftaran bagi siapapun yang ingin mencalonkan dirinya baik itu dari partai lain maupun Kader partai nya sendiri untuk mencalon dan selanjutnya strategi yang digunakan oleh Ketua DPD Partai Golkar dengan memberikan wadah serta mencari orang yang memiliki nilai jual di masyarakat yang berbobot kualitasnya. Namun dalam pengawasan ketua DPD Partai Golkar tidak memiliki andil besar dalam menentukan siapa nantinya yang akan di usung oleh Partainya karena Ketua DPD Partai Golkar hanya merekomendasikan nama-nama bakal calon.

Nama-nama tadi diserahkan kepada DPD tingkat 2 di Provinsi dan di kirimkan kepada DPP tingkat 1 yang ada di pusat. Di DPP tingkat 1 tadilah selanjutnya nama-nama tadi akan diseleksi mengenai kredibilitas pemimpinnya dan kemudian DPP Tingkat 1 akan terjun kelapangan untuk melakukan survey terhadap nama-nama yang telah mendaftarkan dirinya tadi.

Sebagaimana teori yang telah Penulis Uraikan di Bab II mengenai Peran adalah tindakan atau sesuatu yang dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial di dalam suatu organisasi yang di harapkan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai



kedudukannya. Penulis di sini menggunakan 4 jenis peran yaitu menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*), Peran yang di anjurkan (*Prescribed Role*), Kegagalan Peran (*Role Failure*), dan Rangkaian atau Lingkup peranan (*Role Set*). Yang mana dalam jenis-jenis peran disana menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya peran seorang Pemimpin itu dijalankan apa saja faktor yang menyebabkan ke gagalannya peran tersebut.

Namun yang terjadi kenyataannya Ketua DPD disini menjalankan perannya tidak memiliki andil besar dalam menentukan bakal calon. Meskipun aturannya dalam menyeleksi nama-nama bakal calon adalah DPP dari Tingkat 1. Padahal kita ketahui dalam AD ART Partai Golkar Tugas wewenang dan tanggung jawab Ketua DPD itu ada membahas mengenai mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga yang mengetahui kualitas orang-orang dalam suatu partai itu pasti dari dalam Partai juga, apalagi dalam pemilihan Kepala Daerah ketika suatu Partai ikut dalam Pilkada tersebut pasti partai itu mengetahui siapa yang berkualitas dan yang akan direkomendasikan untuk menjadi bakal calon dan ia paham akan daerahnya sendiri.

Undang-undang Pilkada mengamanatkan bahwa setiap Partai Politik itu melakukan rekrutmen calon Kepala Daerah secara Terbuka dan Demokratis dalam setiap tahapan Pencalonannya, yang dimulai dari penjangkaran, seleksi kandidat, dan penetapan kandidat. Namun kenyataannya sekarang proses rekrutmen yang terbuka itu tidak dijelaskan

secara rinci sehingga masyarakat berpikir bahwa adanya kepentingan-kepentingan masing-masing Partai Politik.

Meskipun aturannya harus dari Tahapan DPD Tingkat 2 dan DPP tingkat 1. Alangkah lebih baiknya didalam suatu partai itu memberikan seleksi terlebih dahulu kepada bakal Calon , sehingga nantinya ketika nama tadi sudah di serahkan kepada DPD Tingkat 2 dan DPP tingkat 1 itu sudah menjadi pilihan yang terbaik .

Sehingga tidak ada lagi ketika ingin Mencalonkan dirinya adanya *Isu money politik* atau yang dikenal dengan ‘‘Mahar Politik’’ dalam mencapai itu semua dan tidak ada lagi main-main mata. Karena sesuatu yang di peroleh dengan jalan yang tidak baik maka suatu saat akan menjadi boomerang untuk dirinya sendiri.

Apabila kita kaitkan dalam pandangan islam, Pemimpin itu harus mempunyai keahlian di bidangnya, pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana Sabda Rasulullah sa. ‘‘Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya’’. (HR Bukhori dan Muslim).

Dari sepenggalan kutipan hadis di atas secara eksplisit menerangkan bahwa dalam memberikan tugas atau wewenang itu hendaknya diserahkan kepada yang mempunyai keahlian dibidangnya, sama halnya dengan suatu Partai Politik apabila dalam Pilkada untuk merekomendasikan nama-nama yang akan di ajukan hendaknya di seleksi

terlebih dahulu dalam internal partai atau adanya penyeleksian dari Ketua DPD Partai itu sendiri. Sehingga bisa menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkualitas .

Seorang pemimpin merupakan sentral figur dan profil panutan publik. Terwujudnya kemaslahatan umat sebagai tujuan sangat tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dengan demikian kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin mencakup semua karakteristik yang mampu membuat kepemimpinan dapat dirasakan manfaat oleh orang lain. Dalam konsep Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cakupan sebagai berikut:

- a. Karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan adalah: Pertama, Shidiq (jujur). Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.( Q.S. An-Nisa Ayat 58).

Ayat di atas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada ahliha yakni pemiliknya. Ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan “apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia”. Ini bearti bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan.

- b. Seorang pemimpin haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggung jawab.
- c. Pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh, tidak boleh orang dhalim, fasiq, berbut keji, lalai akan perintah Allah Swt dan melanggar batas-batasnya. Pemimpin yang zhalim, batal kepemimpinannya.
- d. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya dan sesuai keahliannya. Sebaliknya Negara dan rakyat akan hancur bila dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw “Apabila diserahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran suatu saat”.

Apabila kita kaitkan dalam pandangan islam , mengenai karakteristik pemimpin yang harus dimiliki seorang pemimpin. Harus jujur, orang yang berilmu, bertaqwa serta beramal shaleh, dan bertanggung

jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai keahliannya. Jika kita melihat ke atas, mengenai apa yang sudah penulis tulis tentang peran Ketua DPD Partai Golkar yang hanya sedikit saja perannya dalam menentukan calon Kepala daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Padahal kita berharap bahwa Seorang Ketua DPD Partai Itu harus mempunyai Peran Besar dalam mencetak Pemimpin yang Berkualitas dan memiliki Karakteristik seorang pemimpin yang ada pada Islam.

Sehingga kejadian-kejadian isu money politik dan Korupsi itu tidak akan terjadi pada Kepala Daerah, banyak sekali sekarang beredar berita-berita mengenai Kepala Daerah yang melakukan tindakan dugaan Korupsi. Salah satunya berita mengenai Penangkapan Bupati Hulu Sungai Utara dan sekaligus ia adalah Ketua DPD Partai Golkar yang di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan Gratifikasi.

Mengenai kasus tersebut, maka berkaitan dengan judul yang peneliti tulis yang mana peneliti ingin melihat Peran Ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menentukan calon kepala daerah. karena kita ketahui, sesuatu yang di jalankan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga dan apabila sesuatu yang dijalankan dengan tidak baik maka akan menghasilkan tidak baik juga.